

Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Mengajukan Penerbitan *Grosse Akta* Pengganti Karena Hilang Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Jajat Sudrajat¹, Moh. Asep Suharna², Tuti Herawati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Subang, Subang, Indonesia

E-mail: jajatsudrajat@gmail.com¹, asepsuharna@unsub.ac.id², tutiherawati090266@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Juni 2026

Revised: 01 Juli 2026

Accepted: 06 Juli 2026

Keywords: *Grosse Akta*, pendaftaran kapal, kepastian hukum, perlindungan hukum, hukum maritim, administrasi pemerintahan.

Abstract: *Grosse Akta* merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan serta legalitas operasional kapal. Kehilangan dokumen tersebut menimbulkan persoalan hukum karena belum banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara mekanisme peradilan voluntair dan kewenangan administratif dalam penerbitan dokumen pengganti. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penerbitan *Grosse Akta* pengganti akibat kehilangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 serta mengkaji kekuatan hukum penetapan pengadilan sebagai dasar tindakan administratif Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen deklaratif yang memberikan legitimasi hukum bagi penerbitan *Grosse Akta* pengganti sekaligus mencegah penyalahgunaan dokumen. Temuan ini menegaskan adanya keterkaitan yang erat antara fungsi peradilan dan administrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak pemilik kapal, serta tertib administrasi pendaftaran kapal di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menetapkan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, penyediaan dan pengelolaan dokumen negara, termasuk dokumen kepemilikan kapal seperti *Grosse Akta*, merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi. Pada praktiknya, *Grosse Akta* berfungsi sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan eksekutorial, yang tidak hanya membuktikan kepemilikan kapal, tetapi juga menjadi dasar dalam pembebanan hak kebendaan berupa hipotek kapal. Oleh karena sifatnya sebagai akta otentik, kehilangan *Grosse Akta* dapat menghilangkan alat bukti yang sempurna

sehingga menimbulkan persoalan serius dalam pembuktian dan administrasi pelayaran.

Dalam hukum administrasi, suatu tindakan pemerintahan hanya sah apabila didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan didukung legitimasi hukum yang memadai. Oleh sebab itu, penerbitan Grosse Akta pengganti memerlukan pemeriksaan yuridis melalui lembaga peradilan guna menjamin kebenaran keadaan hilangnya dokumen tersebut. Putusan deklaratoir dalam ranah peradilan voluntair merupakan bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya diberikan kepada pemilik kapal, tetapi juga kepada pejabat administrasi yang menerbitkan dokumen pengganti agar tidak dianggap melampaui kewenangan.

Sejumlah pendapat ahli menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan unsur fundamental dalam negara hukum. Hadjon menekankan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi warga negara yang menghadapi potensi ketidakpastian hukum. Selain itu, asas legalitas dalam tindakan pemerintah merupakan syarat mutlak bagi keabsahan keputusan administrasi negara.

Di sisi lain, prosedur pembuktian dalam permohonan penerbitan Grosse Akta pengganti tidak dapat hanya mengandalkan dokumen turunan. Menurut Mertokusumo, hakim dapat membentuk keyakinannya melalui alat bukti tidak langsung berupa petunjuk (indikasi) yang mendukung terjadinya suatu keadaan hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memainkan peran penting saat dokumen otentik hilang dan tidak dapat ditampilkan sebagai bukti.

Regulasi teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 mengatur bahwa dokumen kapal yang hilang harus diganti melalui permohonan kepada pejabat yang berwenang. Namun, khusus untuk Grosse Akta, syarat tersebut harus dilengkapi dengan penetapan pengadilan karena pejabat administrasi tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan hilangnya dokumen otentik.

Melihat konstruksi hukum tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum pelayaran, hukum administrasi negara, dan teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Permasalahan kehilangan Grosse Akta tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan kapal serta kepastian hukum dalam sistem pendaftaran kapal di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini mengkaji secara komprehensif hubungan yuridis antara permohonan penerbitan Grosse Akta pengganti karena hilang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. sebagai legalitas formal bagi pejabat administrasi dalam menerbitkan dokumen pengganti.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada beberapa konsep yang saling berkaitan, yaitu teori negara hukum, teori kewenangan administrasi, teori pembuktian, serta perlindungan hukum. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintahan wajib berdasarkan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak warga negara. Hal ini berkaitan dengan kewenangan administratif KSOP yang hanya dapat bertindak jika terdapat dasar hukum yang sah, termasuk pada penerbitan Grosse Akta pengganti.

Dalam ranah perdata, Grosse Akta termasuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga jika hilang diperlukan pembuktian alternatif berupa bukti petunjuk (indikasi) untuk membangun keyakinan hakim. Kehilangan dokumen otentik juga menyentuh aspek perlindungan hukum, di mana negara wajib memberikan mekanisme preventif dan represif guna menjaga hak kepemilikan pihak yang dirugikan.

Proses permohonan voluntair dalam penerbitan dokumen pengganti merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam administrasi publik. Teori

kewenangan berfungsi menjamin bahwa tindakan pejabat pemerintah tidak melampaui batas yurisdiksi yang telah ditetapkan undang-undang. Selain itu, penerbitan Grosse Akta pengganti harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki kepentingan hukum pada kapal tersebut. Dengan pijakan teori-teori tersebut, proses penerbitan kembali Grosse Akta yang hilang dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, legalitas, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran kapal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian asas, norma, serta ketentuan hukum positif yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji UUD NRI 1945, KUHPerdara, HIR, Undang-Undang terkait pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 sebagai dasar yuridis penerbitan Grosse Akta pengganti. Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. sebagai objek kajian utama.

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks hukum, dan artikel jurnal yang membahas hukum administrasi negara, hukum pelayaran, serta konsep perlindungan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam penetapan pengadilan terkait penerbitan Grosse Akta pengganti. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berangkat dari hilangnya Grosse Akta sebagai dokumen otentik yang memiliki peran fundamental dalam pembuktian kepemilikan kapal. Dalam sistem hukum pelayaran nasional, Grosse Akta tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga merupakan instrumen pemberi kepastian hukum atas status kebendaan kapal, termasuk dalam hal perjanjian pembebanan hipotek atau sengketa perdata yang mungkin timbul di kemudian hari. Ketika Grosse Akta hilang, terjadi kekosongan pembuktian yang mengakibatkan pemilik kapal kehilangan legitimasi formal untuk menjalankan hak dan aktivitas hukum atas kapalnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., diketahui bahwa pengadilan menetapkan kebenaran peristiwa hilangnya Grosse Akta melalui pembuktian dalam proses peradilan voluntair. Proses tersebut dilakukan melalui verifikasi formil berupa laporan kehilangan, dokumen pendukung kepemilikan, serta bukti petunjuk yang secara kumulatif menghasilkan keyakinan hakim mengenai keabsahan dalil pemohon. Pola pembuktian tidak langsung melalui petunjuk ini merupakan karakteristik utama dalam perkara voluntair, karena dalam kondisi hilangnya dokumen otentik, bukti utama tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Penetapan pengadilan bersifat declaratoir, artinya pengadilan hanya menyatakan dan

menegaskan keadaan hukum yang sebenarnya telah melekat pada pemohon sebelum permohonan diajukan. Namun demikian, keberadaan penetapan ini sangat signifikan karena menjadi landasan legalitas bagi pejabat administrasi negara, yaitu KSOP, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta yang hilang. Dengan demikian, pejabat pemerintahan mendapatkan perlindungan hukum preventif agar tindakannya tidak dianggap sebagai pelanggaran asas legalitas atau bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan simbiotik antara proses peradilan voluntair dan tindakan administratif dalam penerbitan Grosse Akta pengganti. Pengadilan berperan sebagai otoritas penilai keabsahan keadaan hukum, sedangkan KSOP sebagai pelaksana kewenangan administratif memastikan keberlanjutan legalitas dokumen pelayaran. Konstelasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengedepankan checks and balances dalam setiap tindakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan dokumen berkekuatan eksekutorial.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kapal, mekanisme ini juga berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan hukum seperti klaim ganda atas satu objek kapal, pemalsuan dokumen, dan penggunaan kapal secara ilegal dalam kegiatan yang merugikan negara. Dengan kata lain, penerbitan Grosse Akta pengganti bukan sekadar penyelesaian administratif, melainkan langkah untuk menjaga integritas sistem pendaftaran kapal nasional sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban pelayaran.

Lebih jauh, temuan penelitian ini mengarah pada urgensi reformasi administrasi pelayaran. Hilangnya dokumen otentik seperti Grosse Akta menunjukkan masih adanya kerentanan dalam sistem penyimpanan dokumen kebendaan. Oleh sebab itu, digitalisasi dan penerapan electronic ship registry menjadi kebutuhan strategis guna mengurangi risiko kehilangan fisik dokumen serta mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses permohonan penerbitan Grosse Akta pengganti merupakan perwujudan konkret dari asas legalitas, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang berjalan dalam keselarasan antara lembaga peradilan dan lembaga administratif. Integrasi kewenangan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum dalam bidang pelayaran Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permohonan penerbitan Grosse Akta pengganti karena hilang dan keterkaitannya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr., dapat disimpulkan bahwa hilangnya Grosse Akta sebagai dokumen otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan kapal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mekanisme permohonan peradilan voluntair merupakan instrumen yang tepat dalam memastikan bahwa kebenaran peristiwa hukum hilangnya dokumen dapat diverifikasi secara sah oleh pengadilan.

Penetapan pengadilan yang bersifat declaratoir memberikan legitimasi formal kepada pemohon dan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam menerbitkan Grosse Akta pengganti sesuai asas legalitas dan kehati-hatian dalam administrasi publik. Hubungan fungsional antara lembaga peradilan dan administrasi pelayaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang preventif sekaligus menjaga integritas sistem pendaftaran kapal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya modernisasi sistem dokumentasi pelayaran melalui penguatan tata kelola arsip dan digitalisasi dokumen, guna meminimalisir risiko kehilangan dokumen serta mempermudah verifikasi pada masa mendatang. Dengan adanya sinergi

antara prosedur hukum acara dan tindakan administratif, penerbitan Grosse Akta pengganti dapat menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa kepemilikan, dan memperkuat keamanan hukum dalam dunia pelayaran nasional..

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan negara hukum*. Sinar Grafika.
- Chara, U. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. PT Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kusuma, I. (2021). *Hukum pelayaran di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum pembuktian*. Liberty.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Subekti. (1997). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (1998). *Hukum acara perdata*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.